



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DR. TRIKA PITANA
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
3. NHK : 798816

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 795.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2013, LAINNYA Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN DIESEL G MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE TYPE G MINI SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, LAINNYA Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 94.100.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. 31.952.399**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 669.442.777



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.880.495.176
III. HUTANG	Rp.	91.922.434
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.788.572.742

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.